

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- R. Soegondo Notodisoerjo, 2013, *Hukum Notaris di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- HS. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum Rajawali Pers*
- Fernando E. Manullang, 2012, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta : Buku Kompas.
- Carl Joachim Friedrich, 2014, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Abdul Gafur Ansori, 2013, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Cetakan Kedua ,Yogyakarta : University Of Gajah Mada.
- A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muhammad Muslehuddin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, Delhi : Markaz Maktabah Islamiyah.
- Jürgen Habermas, 1990, *Moral Consciousness and Communicative Action* Cambridge : MIT Press.
- Bur Rasuanto, 1990, *Keadilan Sosial :Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* , Jakarta : Gramedia.
- Jürgen Habermas, 1990, *Justification and Application : Remarks on Discourse Ethics*, Oxfords : Polity Press.

- Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok filsafat hukum cetakan ketiga*, Jakarta : Asdi Mahastya.
- Friedman L, 2004, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke II*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lemaire, W.L.G, 1955, "*Het Recht in Indonesia*" NV Uitgeverij dalam Abdurrahman Mengenai Hukum Agraria, Bandung.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi 1998, *Hak Menguasai dari Negara (HMN) Persoalan sejarah yang harus di selesaikan*, Jakarta : KRHN & KPA.
- Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muchsin, Imam Koeswahyono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Bandung : Refika Aditama.
- Iman Soetiknjo, 1987, "*Proses Terjadinya UUPA, Peran Serta Seksi Agraria*" Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Arie S.Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Maria S.W, 2009, *Tanah dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Budaya*, Jakarta : Kompas.

- Dr.Umar Ma'ruf S.H., Sp.N., M.Hum, 2014, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah dan Asas-Asas Hukum Pertanahan*, Unissula Press.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Perjanjiaan*, Edisi Revisi Jakarta : PT. Pradnya Pratama.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2016, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Jakarta : Prenada Media.
- Mariam Darus Badrul zaman, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS, 2018, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ke III Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Soedewi, 2016, *Hukum Jaminan di Indonesia Serta Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Bandung : Rafika Aditama.
- Salim HS, 2018, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi Revisi Jakarta : Sinar Grafika.
- Riky Rustam, 2014, *Hukum Jaminan*, Jakarta : Rajawali Press
- Habib Adjie, SH. M.Hum, 2000, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan atas Tanah*, Bandung : Mandar Maju.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat* , Jakarta : Kencana.
- Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel, 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria yang mengatur penguasaan, pemilikan dan penggunaan pemanfaatan tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Negara ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1996 tentang bentuk SKMHT, APHT, sertifikat hak tanggungan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang pendaftaran hak tanggungan secara elektronik.

C. Jurnal / Artikel Ilmiah

Effendi Paragin, *Praktik Penggunaan Tanah sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mushaffa, 2017, *Peranan Notaris Dalam Pengikatan Agunan dengan Hak Tanggungan*, Volume 4 nomor 1, Maret 2017,

jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1558/1203.

Setyaningsih, Anis Masdurohatun, 2018, "*Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur dan Debitur dengan Jaminan Hak Tanggungan di Purwokerto*", Volume 5 Nomor 1, Maret 2018, jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2547/1908

Sulistiani, Jawade Hafidz , 2017, “*Kerjasama Notaris- Ppat terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan*, Volume 4 Nomor 4, Desember 2017,
jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2514/1877.

Ragga Bimantara, ETTY Mulyati, 2019, “*Penerapan Konsinyasi terhadap Objek yang sudah dijaminakan melalui hak tanggungan*., Volume 7 Nomor 2, Agustus 2019,
file://C:/User/Asus/AppData/Local/Temp/645-1982-1-PB.pdf,

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d78bcd61c63c/mechanisme-pendaftaran-hak-tanggungan-secara-elektronik/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020 02.25 WIB

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/21128/kementerian-atrbpn-luncurkan-layanan-elektronik/0/berita>, diakses tanggal 26 Mei 2020 Pukul 04.00 WIB

<https://litigasi.co.id/hukum-perdata/125/sebab-sebab-berakhirnya-kontrak>, diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 16.00 WIB.